

352.107  
Sep  
h  
2007

15490 / 15852

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**INDERALAYA**

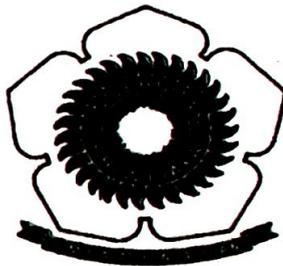
**SKRIPSI**



**HUBUNGAN KETIMPANGAN PDRB DENGAN**

**DERAJAT OTONOMI FISKAL**

**ANTAR KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA SELATAN**



**Disusun Oleh :**

**RENI SEPTIANA**

**01033120033**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT**

**GUNA MENCAPAI GELAR**

**SARJANA EKONOMI**

**2007**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**INDERALAYA**

**TANDA PERSETUJUAN DRAFT SKRIPSI**

**Nama** : Reni Septiana  
**NIM** : 01033120033  
**Jurusan** : Ekonomi Pembangunan  
**Mata Kuliah** : Keuangan Daerah  
**Judul Skripsi** : Hubungan Ketimpangan PDRB Dengan  
Derajat Otonomi Fiskal Antar  
kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

**PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI**

**Tanggal: 27 Januari 2007** Ketua



**Dr. H. Didik Susetyo, M.Si**  
**NIP: 131673869**

**Tanggal: 30 Januari 2007** Anggota



**Drs. Schel, M.Si**  
**NIP. 131993979**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA**

**HUBUNGAN KETIMPANGAN PDRB DENGAN  
DERAJAT OTONOMI FISKAL ANTAR KABUPATEN/KOTA  
DI SUMATERA SELATAN**

**Telah dipertahankan di depan panitia ujian komprehensif  
Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2007  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.**

**Panitia Ujian Komprehensif  
Inderalaya, 13 Februari 2007**

**Ketua :**



**Dr. H. Didik Susetyo, M.Si  
NIP : 131673869**

**Anggota :**



**Drs. Suhel, M.Si  
NIP : 131993979**

**Anggota :**



**Dr. Azwardi, M.Si  
NIP : 132050494**

**Mengetahui  
Ketua Jurusan,**



**Dr. Taufiq Marwa, M.Si  
NIP : 132050493**

## *Motto dan Persembahan*

*Kebodohan merupakan tanda kematian jiwa, terbunuhnya kehidupan, dan membusuknya umur.*

*(DR. Aidhi al-Qorni)*

*"Sesungguhnya Aku mengingatkan kepadamu supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan."*

*(QS. Hud: 46)*

*"pelajarilah ilmu. Barang siapa mempelajarinya karena Allah, itu takwa. Menuntutnya, itu ibadah. Mengulang-ngulangnya, itu tasbih. Membahasnya itu jihad. Mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu, itu sedekah. Memberikannya kepada ahlinya, itu mendekatkan diri kepada Tuhan."*

*(Abusy Syaikh Ibnu Hibban dan Ibnu Abdil Barr, Ihya Al-Ghozali, 1986)*

*Skripsi ini kupersembahkan kepada :*

- ♥ *Ayahanda Muhammad Nur dan Ibunda Hernida Tercinta*
- ♥ *Yuk Nope, Aak Ben, Va, Adikku Ana&Ani Tersayang*
- ♥ *My Soulmate Forever*
- ♥ *Almamaterku*

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Alhamdulillah dengan segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt serta shalawat dan salam penulis juga panjatkan atas junjungan Nabi Muhammad Saw sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Judul penelitian ini adalah “Hubungan Ketimpangan PDRB dengan Derajat Otonomi Fiskal Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan”. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana dengan menggunakan Program SPSS Versi 11.5. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder dalam bentuk *time series* (1993-2005) yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS), literatur-literatur, dan penelitian terdahulu.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran penulis terima dengan hati terbuka dan rasa terima kasih.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Didik Susetyo, M.Si dan Bapak Drs. Suhel, M.Si yang telah membantu dengan segenap perhatian, kesabaran, dan ketulusan untuk memberikan bimbingan, arahan serta dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Syamsurijal, AK, M.Sc, PhD selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
2. Bapak Dr. Taufiq Marwa, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan.
3. Bapak Dr. H. Didik Susetyo, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi 1.
4. Bapak Drs. Suhel, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi 2.

5. Bapak Dr. Azwardi, M. Si selaku Dosen Tamu Penguji Komprehensif.
6. Ibu Dr. Bernadete Robiani, M.Sc selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak ilmu selama di bangku kuliah. Terima kasih atas semuanya.
8. Kepada kedua Orangtuaku Muhamad Nur dan Hernida, Ayuk Nope, Aak Beni, Ua, dan Adikku kembar Ana dan Ani, yang telah memberikan semangat, doa, dorongan, *and everything I need* sehingga Re bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Yuk Rosita, Kak Jo, Kak Eka, Kak In, Yuk Semi, terima kasih atas semua pelayanan yang diberikan dan juga kebersamaan yang hangat.
10. Buat staf perpustakaan, Enik, Kak Octa, Yuk Ita, Kak Udin, Thanks banget atas pinjaman bukunya.
11. *For my soul mate forever*, Fathdi and *Family*... Mom's Fa terima kasih atas doanya Bu, akhirnya Re bisa nyelesain skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku yang setia dalam suka maupun duka, Why, Etty, Bunga, Pipit, Lee, Evi, dan Nia, perjuangan kita belum berakhir... Moga persahabatan kita tidak habis di makan waktu. .."*One for All, All for One*".
13. Bunga dan Keluarga, terima kasih banyak atas bantuan catridnya ya !
14. Teman-teman EP'03 and EP'02, Sisti, Bik Ren, Shanty Kokom, Nurul, Shanty Ook, Lia, Uchie&Kak Anca, Vika, Feith, Ria, Inge, Ruth, Mimin, Dita, Erlin, Tika, Leni, Asep, Hari, Alam, Bowik, Kak Ajip, Yadi, Rizki,

Fajar, Acen, Ajie, Aang, Kalian teman-teman yang menyenangkan...*Nice to see you!*

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu selama perkuliahan sampai selesai skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah Swt memberikan balasan atas budi baiknya dan berkah kepada kita semua, Amin.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Palembang, 17 Februari 2007

Penulis

**(Reni Septiana)**

## ABSTRACT

The research is aimed to find out whether or not there were any significant inequality between Gross of Regional Domestic Product and Level of Fiscal Autonomy among regencies or cities in South Sumatera. To collect the required data in this research, the writer used secondary data 1993-2005 periods. To measure the significant inequality in Gross of Regional Domestic Product, the writer used Williamson Index. The result of the research was analyzed by using SLS with program SPSS 11.5 Version. The analysis showed that there were two significant correlations between variables. In which, between Palembang and Lahat have positive correlation meanwhile the other areas such as Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Musi Rawas, and Musi Banyu Asin have negative correlation.

***Key words:*** *inequality of Gross of Regional Domestic Product, Level of Fiscal Autonomy, Regional Income, and Total Regional Tax.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan ketimpangan PDRB dengan Derajat Otonomi Fiskal antar Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data sekunder periode tahun 1993-2005. Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur ketimpangan PDRB adalah dengan menggunakan Indeks Williamson. Metode analisis yang digunakan adalah SLS dengan Program SPSS 11.5 untuk menentukan hubungan ketimpangan PDRB dengan Derajat Otonomi Fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua hubungan antara variabel. Palembang dan Lahat memiliki hubungan positif dan daerah lain seperti Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Musi Rawas, dan Musi Banyuasin memiliki hubungan negatif.

**Kata Kunci :** *ketimpangan PDRB, Derajat Otonomi Fiskal, PAD, TPD.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR GRAFIK.....	xv
DAFTAR KURVA.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii

### BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Perumusan Masalah.....	7
I.3 Tujuan.....	8
I.4 Manfaat.....	8

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	9
2.1.2 Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah.....	12
2.1.3 Desentralisasi Fiskal.....	15
2.1.4 Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	17



2.1.5 Ketergantungan Fiskal.....	20
2.2 Penelitian Terdahulu.....	21
2.3 Kerangka Pemikiran.....	23
2.4 Hipotesis.....	24

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	25
3.2 Data dan Sumber Data.....	25
3.3 Teknik Analisis Data.....	25
3.4 Batasan Variabel Operasional.....	30

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Wilayah Administratif Sumatera Selatan.....	32
4.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.....	32
4.3 Kondisi Perekonomian Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan	
4.3.1 PDRB Antar Kabupaten/Kota.....	36
4.3.2 Kondisi Pendapatan Per Kapita Kabupaten/Kota.....	39
4.4 Kondisi Penerimaan Daerah Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan	
4.4.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota.....	42
4.4.2 Pajak Daerah Kabupaten/Kota.....	46
4.4.3 Retribusi Daerah Kabupaten/Kota.....	49
4.5 Analisis Hubungan Ketimpangan PDRB Dengan Derajat Otonomi Fiskal antar Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan	
4.5.1 Analisis Ketimpangan PDRB Per Kapita.....	52
4.5.2 Analisis Derajat Otonomi Fiskal.....	55

4.5.3 Hasil Regresi Hubungan Ketimpangan PDRB Dengan Derajat Otonomi Fiskal Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.....	60
---	----

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran .....	67

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>
----------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Berdasarkan Harga Berlaku (000 rupiah).....	4
Tabel 1.2 Perkembangan PAD Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun .....	6
Tabel 3.1 Klasifikasi Derajat Otonomi Fiskal Menurut Besarnya PAD.....	28
Tabel 4.1 Perkembangan Jumlah Penduduk antar Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.....	34
Tabel 4.2 Perkembangan PDRB Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Konstan 1993-200 Dengan Migas.....	37
Tabel 4.3 Perkembangan Pendapatan Per Kapita Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan 1993-2005.....	41
Tabel 4.4 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Antar Kabupaten/kota Sumatera Selatan (000).....	44
Tabel 4.5 Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.....	47
Tabel 4.6 Perkembangan penerimaan Retribusi Daerah Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.....	50
Tabel 4.7 Indeks Williamson Antar Daerah di Sumatera Selatan.....	53
Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.....	57
Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Regresi Linier .....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Kerangka Pikir Penelitian.....	24
---	----

## DAFTAR GRAFIK

Garafik 4.1 Perkembangan Jumlah Penduduk antar Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.....	35
Garafik 4.2 Perkembangan PDRB Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Konstan 1993-200 Dengan Migas.....	38
Garafik 4.3 Perkembangan Pendapatan Per Kapita Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan1993-2005.....	40
Garafik 4.4 Perkembngan Pendapatan Asli Daerah Antar Kabupaten/kota Sumatera Selatan (000).....	45
Garafik 4.5 Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.....	48
Garafik 4.6 Perkembangan penerimaan Retribusi Daerah Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.....	51
Garafik 4.7 Indeks Williamson Antar Daerah di Sumatera Selatan.....	54
Garafik 4.8 Hasil Perhitungan Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.....	58

## DAFTAR KURVA

Kurva 2.1 Kurva Lorenz.....	13
Kurva 2.2 Kurva Lorenz dan Koefisien Gini.....	14
Kurva 3.1 Pengujian T-Statistik.....	29
Kurva 4.1 Pengujian T-Statistik Kota Palembang.....	63
Kurva 4.2 Pengujian T-Statistik Kabupaten Muara Enim.....	64

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.	Perhitungan Indeks Williamson Kabupaten/Kota Sumatera Selatan Periode 1993-2005.....	70
Lampiran II.	Perhitungan Derajat Otonomi Fiskal Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan periode 1993-2005.....	77
Lampiran III.	Hasil Regresi Hubungan Ketimpangan PDRB dengan Derajat Otonomi Fiskal Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.....	79

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Konsep otonomi daerah yang berlaku di Indonesia telah memberikan keleluasaan bagi setiap pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan sosial, politik, dan terutama kegiatan ekonomi daerah. Menurut Basri (2002 : 174) hakikat otonomi adalah mengembangkan manusia-manusia Indonesia yang otonom, yang memberikan keleluasaan mengembangkan potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal. Penguatan otonomi daerah harus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap pelaku dalam rambu-rambu yang disepakati bersama sebagai jaminan terselenggaranya pemerataan (*social order*). Otonomi juga memberikan peluang bagi persaingan sehat antardaerah dengan jaringan pengaman, bagi tercapainya persyaratan minimum bagi daerah-daerah yang dipandang masih belum mampu menyejajarkan diri dalam suatu tingkat kesejahteraan (*Level of Playing Field*).

Konsep dasar sistem pemerintahan otonomi daerah adalah memberikan wewenang kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh daerah itu sendiri dan pemerintah pusat akan membantu dan memelihara kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan di daerah.

Ada dua hal yang mampu diciptakan melalui pemberian kebijakan otonomi daerah yaitu. *Pertama*, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). *Kedua*, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat (Mardiasmo, 2002: 4).

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Indikator ini juga memberikan gambaran tentang sejauh mana aktivitas perekonomian suatu daerah pada periode tertentu telah menghasilkan peningkatan pendapatan bagi masyarakat yang ditunjukkan oleh terjadinya kenaikan pendapatan per kapita. Oleh karena itu, laju pertumbuhan merupakan salah satu variabel dari indikator ekonomi yang merupakan kunci dalam pembangunan.

Keberhasilan suatu pembangunan daerah dilihat dari pertumbuhan output di dalam suatu perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu yang telah memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat. Perekonomian di setiap daerah terbentuk dari berbagai macam kegiatan ekonomi yang dilakukan di daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan keadaan perekonomian daerah

dan juga kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki dan disamping itu pula merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi yang berbeda antar daerah merupakan hal yang wajar dalam konsep pembangunan nasional. Soeroso dan Biarratani dalam Sulistina (2005 : 2) mengungkapkan perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antar daerah telah menarik modal dan tenaga kerja ke daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan dalam pola pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Pembangunan di daerah yang tingkat kegiatan ekonominya tinggi cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pembangunan di daerah yang tingkat kegiatan ekonominya rendah.

Perbedaan tingkat pendapatan antar daerah didasari oleh perbedaan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing propinsi. Perbedaan sumber daya alam antar propinsi, terutama minyak dan gas, dan terkonsentrasinya perdagangan dan pusat industri pada wilayah tertentu telah menciptakan pertumbuhan pada daerah-daerah kantong. Faktor-faktor di atas menyebabkan perbedaan tingkat output yang diproduksi dan tingkat pendapatan antar daerah semakin tajam.

Haryanto (2005 : 21) mengungkapkan bahwa besar kesenjangan tergantung dari besar kecilnya faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti perbedaan struktur sosial ekonomi dan distribusi spasial dari faktor-faktor *endowment*. Kesenjangan

antar daerah semakin nyata keberadaanya sehubungan dengan kekacauan sosial ekonomi dan ketidakmobilan sumber-sumber ekonomi.

Sehubungan dengan adanya perbedaan potensi daerah yang dimiliki, maka Susetyo (1995 : 1) menyatakan bahwa pembangunan daerah mendapat perhatian yang serius sehingga berbagai sumber pembangunan akan teralokasi ke daerah guna mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang tercipta pada suatu daerah merupakan tolak ukur dalam menilai dampak kebijakan pembangunan yang dilakukan khususnya di bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung merupakan gambaran dari tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Tabel 1.1 menunjukkan keberhasilan dari pembangunan antar Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan**  
**Berdasarkan Harga Berlaku Tahun Dasar 2000**  
**(jutaan rupiah)**

No	Kota/Kabupaten	2001	2002	2003	2004
1.	Palembang	12.316.403	14.531.879	17.140.581	19.397.647
2.	OKU	4.642.490	5.124.189	5.642.299	2.908.811
3.	OKI	3.528.699	3.926.851	4.313.889	3.136.471
4.	Muara Enim	7.153.609	6.703.621	7.509.230	8.412.484
5.	Lahat	2.782.893	2.893.809	2.889.172	3.189.102
6.	Musi Rawas	3.279.873	2.806.295	3.148.080	3.565.320
7.	Musi Banyuasin	13.232.196	14.095.130,53	11.215.237	13.622.317

*Sumber : BPS, PDRB Kabupaten/Kota Indonesia, 2001-2004.*

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan PDRB ketujuh Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan masing-masing berbeda. Jika dilihat PDRB masing-masing kabupaten dari tahun 2001 hingga 2004, Kota Palembang merupakan daerah yang PDRB terbesar sedangkan Lahat merupakan wilayah terendah. Rata-rata PDRB Kota Palembang selama periode tersebut yaitu sebesar 15.846.639,78 juta dengan pertumbuhan sebesar 16,37 persen. Kabupaten Lahat memiliki nilai PDRB hanya sebesar 2.939.247,56 juta dengan pertumbuhan sebesar 4,76 persen. Jika dilihat rata-rata pertumbuhan secara keseluruhan, wilayah OKU dan OKU memiliki pertumbuhan yang menurun yaitu sebesar (-9,32) dan (-2,05).

Di sisi lain pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu unsur yang cukup menentukan, bagaimana pemerintah daerah mampu untuk mengembangkan sumber-sumber PAD, karena derajat otonomi fiskal suatu daerah tolak ukurnya ditentukan dengan merasiokan Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah (Kuncoro, 2004 : 8). Peningkatan PAD dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu faktor pendapatan per kapita masyarakat serta pertumbuhan ekonomi. Naik turunnya faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi besar kecilnya PAD. Semakin besar pendapatan per kapita masyarakat semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah maka semakin besar pula kenaikan PAD.

PAD yang merupakan salah satu sumber keuangan daerah memiliki potensi yang cukup besar terhadap penerimaan setiap daerah. Dari Tabel 1.2 di tunjukkan bahwa penerimaan PAD dari seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan secara garis besar mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa

kebijakan otonomi tersebut dapat menggali potensi ekonomi dari seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan PAD Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan**  
**Tahun 2000-2004**  
**(jutaan rupiah)**

No.	Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005
1.	Palembang	35.501,29	36.037,25	57.496,30	76.137,95	92.504,03
2.	OKU	9.235,42	8.312,54	16.853,72	17.151,24	18.332,44
3.	OKI	9.277,43	10.734,44	13.824,12	16.132,12	10.212,08
4.	Muara Enim	20.024,26	16.512,27	27.078,41	37.048,19	34.819,45
5.	Lahat	6.039,56	7.363,57	10.138,49	13.311,56	18.332,44
6.	Musi Rawas	10.571,50	8.687,61	13.133,82	11.938,33	12.001,81
7.	Musi Banyuasin	8.826,89	11.095,13	23.880,87	25.543,46	10.367,50

*Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemda Kabupaten/Kota, 2001-2005.*

Jika dilihat Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa potensi PAD masing-masing daerah memiliki perbedaan yang relatif besar. Terlihat bahwa penerimaan PAD terbesar adalah Kota Palembang dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 28,74 dan nilai PAD sebesar 41,034 juta. Tetapi Kabupaten Musi Rawas merupakan wilayah yang memiliki rata-rata pertumbuhan terendah yaitu hanya sebesar 6,19, sedangkan Lahat merupakan wilayah yang memiliki PAD terendah. Kondisi yang berbeda ini mengindikasikan bahwa kemampuan PAD dalam membiayai pembangunan tiap daerah memiliki porsi yang berbeda.

Mengingat kondisi dan potensi yang berbeda antara masing-masing daerah membawa konsekuensi adanya perbedaan kemampuan dalam menggerakkan kegiatan pembangunan dan menggali potensi daerah yang ada sehingga dapat menimbulkan

berbagai persoalan pada masing-masing daerah, terutama menyangkut kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerah. Adanya perbedaan baik dari segi PDRB maupun potensi PAD antar daerah, maka akan menyebabkan terjadinya ketimpangan antar daerah. PDRB yang berbeda akan mempengaruhi potensi PAD setiap daerah yang pada akhirnya akan mempengaruhi derajat otonomi fiskal atau kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana hubungan ketimpangan PDRB dengan derajat otonomi fiskal antar Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah mengenai :

1. Berapa besar tingkat Ketimpangan PDRB yang terjadi di Sumatera Selatan.
2. Berapa besar tingkat Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
3. Bagaimana hubungan ketimpangan PDRB dengan Derajat Otonomi Fiskal antar Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk melihat berapa besar tingkat Ketimpangan PDRB yang terjadi di Sumatera Selatan.
2. Untuk melihat berapa besar tingkat Derajat Otonomi Fiskal (DOF) antar Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
3. Untuk melihat hubungan ketimpangan PDRB dengan Derajat Otonomi Fiskal antar Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukan penulisan ini, maka diharapkan dapat bermanfaat :

1. Bagi Kalangan Akademik

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan bahan masukan atau referensi untuk pengembangan kajian ilmu yang berkaitan dengan pembangunan daerah selanjutnya.

2. Bagi Kebijakan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan publik yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan agar lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Faisal H. 2001. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- BPS, *PDRB Kabupaten/Kota Indonesia 1994-2004*.
- BPS, *Statistik Keuangan Pemda Kabupaten/Kota Indonesia 1995-2004*
- Esmara, Henda. 1975. *Bantuan Pembangunan Kepada Kabupaten dan Kotamadya*. Jakarta : Ekonomi dan Keuangan Indonesia (EKI). Vol. XVII No.1.
- Ganda, Hosea Christian. 2005. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ogan Komering Ilir*. Skripsi. Tidak Dipublikasikan. Inderalaya : UNSRI.
- Haryanto, Junison. 2005. *Analisis Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Pemerintah di Kota Musi Banyuasin*. Tesis. Tidak Dipublikasikan. Palembang : PPS UNSRI.
- Kuncoro, M., Saleh, S., & Arsyad, L, 1994, *Desentralisasi Fiskal : Tinjauan dan Implikasinya Bagi Repelita VI, Laporan Penelitian DPP/SPP*. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi UGM.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Ekonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi : Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : Penerbit UPP AMP YKPN.
- Kurniawan, B.F. 2006. *Kausalitas PAD dengan Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang*. Skripsi. Tidak Dipublikasikan. Inderalaya. UNSRI.
- Machmud, Sofyan. 2002. *Analisis Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Sumatera Selatan*. Tesis. Tidak Dipublikasikan. Palembang : PPS UNSRI.
- Mangkoesebroto, Guritno. 1993. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta : BPFE-UGM.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*, Makalah Disampaikan dalam Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, Krisis Moneter Indonesia. Jakarta : FE-UGM.

- Nugroho D., Riant. 2002. *Otonomi Daerah : Desentralisasi Tanpa Revolusi, Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Elex Media Komputindo Kelompok Erlangga.
- NugrohoD.,Riant, 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Penerbit Elex Media Komputindo Kelompok Erlangga.
- Republik Indonesia. 2004. *UU No.32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah*. Bandung : Penerbit Fokusmedia.
- Republik Indonesia. 2004. *UU No. 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Sulistina. 2005. *Ketimpangan Pendapatan Antar Propinsi di Indonesia Pendekatan Analisis Indeks Theil. Paper. Tidak Dipublikasikan. Jakarta : PPS UI*.
- Susetyo, Didik. 1995. *Kajian Tentang Disparitas Pendapatan Asli Daerah Tingkat II di Propinsi Sumatera selatan*. Palembang : LP-UNSRI.
- Tambunan, Tulus. 2003. *Perekonomian Indonesia : Beberapa Masalah Penting*. Edisi Pertama. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Widjaja, H.W.W. 2001. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, H.A.W. 1998. *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Bina Cipta.
- Zahari MS. 2004. *Analisis Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Jambi*. Tesis. Tidak Dipublikasikan. Palembang : PPS UNSRI.
- Zaman, Syahrir. 2006. *Analisis Kesenjangan Pertumbuhan Ekonomi Antar Daerah di Sumatera Selatan*. Tesis. Tidak Dipublikasikan. Palembang : PPS UNS.